



Agd :15264

**KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA  
TOKYO**

5-2-9 Higashi Gotanda, Shinagawa-ku, Tokyo-to, Japan 141-0022  
Telp. +81 3 3441 4201 Fax. +81 3 3447 1697 E-mail : info@kbritokyo.jp

**SEGERA**

Kepala Perwakilan RI

**Tri Purnajaya**  
KUI

**BERITA BIASA**

Nomor : B-00151/TOKYO/200408  
Kepada Yth. : Menteri Luar Negeri, Menteri Koordinator bidang Perekonomian (VK)  
U.p. Yth. : Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika, Staf Ahli Diplomasi Ekonomi, Kepala BPPK, Deputi bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional (Kementerian Koordinator bidang Perekonomian/VK)  
Info Yth. : Wakil Menteri Luar Negeri, Direktur Asia Timur dan Pasifik, Kepala Pusat P2K2 Asia Pasifik dan Afrika, Konsul Jenderal RI Osaka  
Dari : Kepala Perwakilan RI Tokyo  
Jumlah : 3 halaman  
Perihal : Paket Stimulus Ekonomi Jepang untuk Mengatasi Dampak COVID-19

**Ringkasan Eksekutif :**

Perdana Menteri Abe Shinzo telah mengumumkan status keadaan darurat hingga 6 Mei 2020 bagi 7 prefektur, yaitu: Tokyo, Kanagawa, Chiba, Saitama, Osaka, Hyogo, dan Fukuoka pada Selasa, 7 April 2020. Status keadaan darurat akan memungkinkan gubernur prefektur untuk mengambil langkah-langkah pencegahan yang lebih besar, mulai dari menginstruksikan warga untuk tinggal di rumah hingga membatasi operasi sekolah dan fasilitas lainnya seperti pusat perbelanjaan, bioskop, tempat olahraga dan tempat rekreasi.

Pemerintah Jepang menyadari bahwa kebijakan ini akan memberikan dampak besar bagi perekonomian Jepang. Menyikapi hal ini pemerintah Jepang menyediakan Paket Stimulus Ekonomi senilai 108 trilyun yen atau setara dengan 20% dari PDB Jepang. Paket ekonomi akan dikeluarkan dalam dua tahap.

PM Abe juga berkomitmen untuk meningkatkan kapasitas pengujian virus dan mempercepat pengembangan vaksin dan obat-obatan untuk digunakan dalam perawatan pasien COVID-19, termasuk produksi obat anti-flu Avigan. Pemerintah akan meminta perusahaan meningkatkan produksi Avigan hingga 3 kali lipat termasuk untuk memenuhi kebutuhan domestik bagi 2 juta orang.

Merujuk perihal pada pokok berita di atas dan berita kami sebelumnya terkait dampak COVID-19 terhadap perekonomian Jepang, bersama ini dengan hormat disampaikan hal – hal sebagai berikut:

1. Perdana Menteri Abe Shinzo telah mengumumkan status keadaan darurat hingga 6 Mei 2020 bagi 7 prefektur di Jepang, yaitu: Tokyo, Kanagawa, Chiba, Saitama, Osaka, Hyogo, dan Fukuoka pada Selasa, 7 April 2020. Kebijakan ini diputuskan berdasarkan pada *Article 32 Act on Special Measures for Pandemic Influenza and New Infection Diseases Preparedness and Response (Act on Special Measures)*.

2. Status keadaan darurat akan memungkinkan gubernur prefektur untuk mengambil langkah-langkah pencegahan yang lebih besar, seperti meminta masyarakat untuk tinggal di rumah hingga membatasi operasi sekolah dan fasilitas lainnya seperti pusat perbelanjaan, bioskop, tempat olahraga dan tempat rekreasi.
3. Menyikapi dampak kebijakan ini bagi perekonomian, pemerintah Jepang menyediakan Paket Stimulus Ekonomi senilai 108.2 triliun yen (Sekitar USD 990 milyar) atau setara dengan 20% dari Produk Domestik Bruto (PDB) Jepang. Paket ekonomi akan dikeluarkan dalam dua tahap. Fase pertama senilai 60 triliun yen diperuntukan untuk membantu pekerja dan bisnis yang terdampak, dan fase kedua untuk mendukung skenario *V-shaped recovery*. Paket ekonomi akan menekankan *zero interest loans*, *tax breaks* dan subsidi bagi rumah tangga dan UMKM.
  - a. **Rumah Tangga.** Terkait penetapan kriteria rumah tangga yang mendapatkan bantuan ekonomi, akan ditentukan berdasarkan data per kelurahan.
    - Bantuan ekonomi hingga 300,000 yen (USD 2,800) akan diberikan kepada rumah tangga yang pendapatannya menurun lebih dari setengah dibandingkan dengan tahun lalu. Sekitar 10 juta dari 58 juta rumah tangga dinilai akan layak untuk mendapatkan program ini;
    - Tambahan bantuan ekonomi sebesar 10,000 yen per anak akan diberikan di luar dari subsidi reguler yang diberikan per bulan;
    - Pembebasan pajak terbatas pada penduduk yang memiliki pendapatan tahunan kurang dari 1,56 juta yen.
  - b. **UMKM**
    - Pinjaman tanpa bunga (periode 5 tahun) hingga 30 juta yen bagi UMKM yang bisnisnya menurun 20% atau lebih dari bulan sebelumnya;
    - Menyiapkan dana bantuan ekonomi 2 juta yen bagi UMKM yang penjualannya turun lebih dari 50% dibanding tahun sebelumnya, dan 1 juta yen bagi *freelancers* yang terdampak.
    - Penangguhan pembayaran pajak dan asuransi sosial selama 1 tahun.
  - c. **Perusahaan**
    - Pemerintah Jepang akan berikan bantuan ekonomi sebesar setengah dari biaya relokasi produksi bagi setiap perusahaan yang menutup pabriknya di luar negeri;
    - *Crisis response loans* sebesar 5 triliun yen melalui *Development Bank of Japan* dan bank pinjaman lain.
4. Kebijakan ini juga merupakan komitmen pemerintah Jepang untuk melindungi pekerjaan dan kebutuhan hidup masyarakat Jepang. Setiap individu yang terlibat dalam produksi dan distribusi kebutuhan sehari-hari termasuk makanan, bahkan toko ritel akan tetap menjalankan aktivitasnya seperti biasa. Kebijakan ini tidak akan membatasi fasilitas kesehatan, transportasi, perbankan, bursa saham, dan supermarket.
5. Pemerintah juga telah menerima komitmen dari beberapa perusahaan swasta yang bersedia membantu penyediaan masker dan Alat Pelindung Diri (APD). PM Abe berkomitmen untuk meningkatkan kapasitas pengujian virus dan mempercepat pengembangan vaksin dan obat-obatan untuk digunakan dalam perawatan pasien COVID-19, termasuk produksi obat anti-flu Avigan. Pemerintah akan meminta perusahaan meningkatkan produksi Avigan hingga 3 kali lipat termasuk untuk memenuhi kebutuhan domestik bagi 2 juta orang.

### **Catatan/Pengamatan**

6. Asosiasi Medis Jepang dan Asosiasi Medis Tokyo sebelumnya telah menyatakan status Situasi Medis Kritis masing-masing pada 1 dan 6 April 2020 dikarenakan keterbatasan staf medis, fasilitas kesehatan dan ruang perawatan bagi pasien COVID-19. Untuk itu, PM Abe menekankan bahwa kebijakan status darurat Jepang bukan merupakan kebijakan *lockdown* kota, namun

sebagai langkah guna memperlambat penyebaran virus corona dan mencegah kemelut pada layanan kesehatan. Pengumuman status darurat ini akan memberikan kewenangan bagi Gubernur di 7 prefektur untuk:

- meminta masyarakat untuk tinggal di rumah dan mengurangi kontak fisik hingga 70-80%. Menganjurkan agar aktivitas dilakukan dengan cara *teleworking*, *rotating shift* serta *online learning* selama satu bulan ke depan;
  - mengambil alih tanah dan bangunan pribadi untuk digunakan sebagai tambahan fasilitas kesehatan. 10.000 kamar di wilayah Kanto (Tokyo, Chiba, Kanagawa, Saitama), 3.000 kamar di wilayah Kansai (Osaka, Hyogo) dan fasilitas Olimpiade, rencananya akan dimanfaatkan menjadi tempat perawatan bagi pasien dengan gejala ringan;
  - meminta pasokan medis dari perusahaan terkait dan menjatuhkan hukuman bagi pihak yang menimbun kebutuhan atau tidak mematuhi.
7. Penetapan status keadaan darurat selama satu bulan diprediksi akan menekan investasi modal, konsumsi dan ekonomi Jepang secara umum. Penurunan tingkat konsumsi di 7 prefektur tersebut secara otomatis akan menekan tingkat operasi perusahaan manufaktur yang kebanyakan berada di daerah pedesaan. Pengurangan produksi akan menghasilkan kontraksi ekonomi nasional yang lebih dalam pada kuartal April-Juni daripada penurunan yang diperkirakan saat ini sebesar 2,7 persen.
8. PDB tahunan Tokyo menyumbang sekitar sekitar 100 triliun yen (\$ 917 miliar) atau hampir 20 persen dari total PDB Jepang, sementara Osaka sekitar 7%. Akibat kebijakan ini, PDB Jepang diperkirakan akan menurun sekitar 2,8 – 5,9 triliun Yen atau sekitar USD 26 - 54 miliar, atau 0,51 – 0,94 poin persentase. Beberapa analis ekonomi telah memperkirakan beberapa skenario penurunan PDB Jepang sebagai berikut:
- a. BNP Paribas, turun sebesar 4,3 trilyun Yen atau -0.8%pt yang disebabkan utamanya oleh penurunan konsumsi privat dan *capital investment*;
  - b. Nomura Research Institute (NRI), sebesar 5,9 trilyun Yen atau -0.94%pt;
  - c. NLI Research Institute, memprediksi skenario yang tidak terlalu *severe*, yakni penurunan sebesar 2,8 trilyun Yen atau -0.51%pt;
  - d. Dai-ichi Life Research Institute, menekan sekitar 5,1 trilyun Yen atau hampir 1% bagi ekonomi Jepang.
9. Dampak penyebaran Covid 19 juga berpengaruh terhadap investasi Jepang di Luar Negeri, termasuk Indonesia. Pabrik otomotif seperti *Honda Prospect Motor*, *Suzuki Indo Mobil Motor*, *Yamaha Indonesia Motor Manufacturing* akan menghentikan produksi sementara waktu. Hal ini kiranya dapat dicermati oleh Pemri untuk terus mengupayakan kepastian hukum dan kebijakan yang mampu mendukung dan menjaga kesinambungan investasi asing di luar negeri.
10. Kebijakan ini juga akan memberikan tekanan yang semakin besar pada pasar tenaga kerja. Dalam 2 bulan terakhir terdapat 1.200 orang pengangguran yang kehilangan pekerjaannya. Kementerian Tenaga Kerja Jepang telah menyusun program dan akan mengalokasikan uang dalam anggaran tambahan untuk membayar insentif. Belum terdapat informasi detil mengenai program yang akan dijalankan, namun kemungkinan besar program tersebut akan menyerupai program yang pernah dijalankan pemerintah Jepang setelah krisis keuangan global pada tahun 2008.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan arahnya lebih lanjut kami ucapkan terima kasih.

---

Petugas Komunikasi



**Wulan Indriani**

Pembuat Berita



**Rima Cempaka**

Counsellor Fungsi Ekonomi